



Newsletter

BIRO UMUM DAN HUMAS
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Maret 2014

Edisi 03/NL/03/2014

Daftar Isi:

	Hal
1. Pemerintah Ajak Petani Perbesar Produksi Sapi Sehingga Harga Stabil dan Terjangkau Masyarakat.....	1
2. Untuk Mendorong Percepatan Pembangunan Pertanian Diperlukan Perencanaan Yang Tepat & Strategis.....	3
3. Sebagai Lumbung Pangan Indonesia, Jawa Timur Perlu Melakukan Perubahan Kualitas Program Pembangunan Pertanian.....	4
4. Kementan Siapkan Dana 103 M Untuk Atasi Bencana Letusan Gunung Kelud.....	5
5. Masalah Iklim dan Lahan Pertanian Masih Jadi Tantangan.....	7
6. Atasi Serangan OPT Di Ja-Teng, Kementan Menerapkan Langkah Teknis...	8
7. Perkuat Industri Pengolahan Hasil Pertanian Lewat Penerapan Teknologi.....	9
8. Program Integrasi Sawit Berpotensi Capai Target Swasembada Daging.....	10

Pemerintah Ajak Petani Perbesar Produksi Sapi Sehingga Harga Stabil dan Terjangkau Masyarakat

"Perlunya diupayakan kestabilan pasokan daging sapi agar tercipta kestabilan harga daging sapi di pasar. Para peternak sapi dapat memperbesar produksi sapi dalam negeri, sehingga selain peternak mendapatkan penghasilan yang layak, harga jual daging sapi juga dapat terjangkau oleh masyarakat"



(Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat meninjau tempat penggemukan sapi di Peternakan Wahyu Utama Tuban.(Doc.Humas))

Daerah Tuban sekarang menjadi salah satu daerah produsen sapi untuk memenuhi kebutuhan daging di Jawa Timur dan sejumlah kota besar di Pulau Jawa, tercatat populasi sapi dari seluruh peternakan di Kabupaten Tuban mencapai 315.000 ekor.

Untuk itu Pemerintah Indonesia terus menganjurkan para peternak sapi agar selalu memperbesar produksi sapi dalam negeri, sehingga selain peternak akan mendapatkan penghasilan yang layak dan harga jual daging sapi juga dapat terjangkau oleh masyarakat. "Kehidupan semakin lama semakin baik, oleh karena itu, rakyat harus dapat membeli daging sapi dengan harga terjangkau. Diharapkan para peternak sapi dapat memperbesar produksi sapi dalam negeri, sehingga selain peternak mendapatkan penghasilan yang layak, harga jual daging sapi juga dapat terjangkau oleh masyarakat," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat mengunjungi Peternakan Wahyu Utama di Desa Sukolilo, Kelurahan Bulu, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, (13/3).

Presiden berharap agar kehidupan para peternak, petani dan nelayan semakin makmur. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah perlunya diupayakan kestabilan pasokan daging sapi agar tercipta kestabilan harga daging sapi di pasar. "Kita harus terus bersama-sama dalam berupaya meningkatkan kesejahteraan. Jika ada hal yang buruk maka tidak perlu diulang lagi. Negara akan sangat berterimakasih kepada petani dan peternak karena terus meningkatkan produksi pertanian hasil lokal" ujar Presiden.

Presiden sangat mendukung kegigihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memajukan peternakan. Berkat perjuangan dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur itu, peternak semakin

sejahtera dan peternakan Jatim menjadi andalan Indonesia dalam mengatasi kekurangan stok daging. "Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat gigih untuk memperjuangkan kebijakan yang pro peternak. Saya setuju dan saya dukung sepenuhnya karena negara sangat membutuhkan kontribusi peternak" kata Presiden.

Dukungan Presiden diperlukan mengingat peternak memiliki peran penting khususnya dalam memenuhi kebutuhan daging. Jika terjadi kelangkaan daging maka negara mengambil langkah untuk mengimpor daging dari luar negeri, jika hal ini berlangsung terus menerus akibatnya akan fatal, sebab yang menjadi penentu harga adalah yang mengekspor. Bukan tidak mungkin harga daging akan naik tajam. "Kebijakan pemerintah yang ideal adalah memperbesar produksi daging dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kelangkaan daging, meningkatkan kesejahteraan peternak, serta masyarakat dapat membeli daging dengan harga yang terjangkau" kata Presiden

Presiden menerangkan bahwa kunjungannya ke Peternakan Wahyu Utama karena ingin melihat langsung, mendengar langsung, dengan harapan agar kelak makin banyak sapi produksi dalam negeri, dan Indonesia tidak perlu impor sapi dari negara luar seperti New Zealand. "Tanpa kecukupan pasokan sapi lokal, maka pemerintah akan terus menerus diharuskan mengimpor daging sapi, seperti yang sering terjadi saat menjelang hari raya dimana pemerintah terpaksa harus melakukan impor daging sapi" terang Presiden.

Presiden memberikan ucapan selamat kepada kelompok peternak yang mampu secara mandiri menjalankan usaha yang terintegrasi, mulai dari pembibitan hingga pemasaran. Hal tersebut patut menjadi teladan bagi wilayah pedesaan lain di Indonesia. "Peternakan Wahyu Utama mempunyai nilai tambah, yaitu mempunyai integrasi dari mulai pembibitan sampai dengan marketing. Ini contoh bagi peternakan yang lain, jaga, pertahankan, Insya Allah ke depan lebih baik lagi," kata Presiden.

Mengingat peternakan sapi Wahyu Utama di Tuban tersebut merupakan peternakan berskala besar yang dikelola oleh pemodal lokal, maka Presiden berjanji akan membicarakan dengan perbankan, agar bunga yang dipinjamkan kepada petani peternak tidak terlalu tinggi.

"Pemerintah, akan mengeluarkan subsidi 6 persen kepada petani dan peternak agar mereka mempunyai penghasilan yang lebih baik, Sehingga peternak tidak perlu lagi khawatir, karena pemerintah tidak mengabaikan harapan dan keinginan para peternak. Negara sangat berterima kasih sebab kalau tidak ada peternak sapi, kita akan impor daging sapi dengan harga yang tinggi," papar Presiden.



(Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wamentan, Rusman Heriawan, Gubernur Jatim, Soekarwo dan Bupati Tuban Fathul Huda berdialog dengan Peternak Sapi. (Doc.Humas))

Presiden juga mengingatkan pentingnya koperasi yang menjadi landasan penerapan prinsip ekonomi kerakyatan. Diharapkan, para peternak memanfaatkan jasa lembaga koperasi desa dalam upaya pemasaran produk hasil peternakan sapi tersebut.

Berkaitan dengan kebijakan bidang peternakan, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menyatakan Pemprov Jawa Timur telah mengeluarkan kebijakan pro peternak berupa perda menolak impor daging yang membuat iklim peternakan di Jawa Timur semakin maju dan kondusif. Hal ini dibuktikan dengan produksi ternak Jawa Timur tertinggi dibandingkan provinsi lain.

Menurut Gubernur Jawa Timur berdasarkan data Pemprov Jawa Timur secara keseluruhan produksi sapi nasional, 32 persennya dihasilkan di Jawa Timur. Saat sekarang populasi sapi di Jawa Timur sekitar 5,2 juta ekor. Sedangkan jumlah pemotongan sapi potong sebanyak 520 ribu ekor per tahun. "Jawa Timur memiliki kelebihan stok daging sebesar 500 ribu ton, sedangkan kebutuhan daging nasional masih kekurangan 132.000 ton. Oleh karena itu, Jawa Timur mendistribusikannya ke sejumlah daerah di Indonesia. Diantaranya ke DKI Jakarta sebanyak 310.000 ton, Bandung 99.000 ton, dan Kalimantan sebanyak 48.000 ton" jelas Gubernur Jatim.

Sedangkan guna semakin memajukan peternakan di Jawa Timur sekaligus menghadapi era Asean Free Trade Area (AFTA), Gubernur Jawa Timur menerangkan pihaknya berencana akan membuat Rumah Potong Hewan (RPH) dengan tingkat higienis berstandar internasional. Dana RPH ini berasal dari sharing antara Pemprov dan Pemkab/kota. RPH tersebut juga solusi terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan peternak. "Selama ini keuntungan terbesar ketika pemotongan hewan di RPH hanya diperoleh perantara jual beli atau yang disebut blantik, sedangkan peternak yang merawat dan membesarkan sapi hanya memperoleh untung yang sedikit. Untuk itu ke depan peternak bisa menggunakan pemotong modern yang sudah disiapkan di tempat. Jadi sudah tidak ada blantik lagi" kata Gubernur Jatim.

Terkait masalah Rumah Potong Hewan, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan bahwa

hingga saat sekarang masih banyak penduduk memiliki Rumah Potong Hewan (RPH) secara perorangan tetapi belum memenuhi syarat.

"Saat ini permintaan daging sapi terus meningkat. Permintaan meningkat khususnya datang dari Jakarta, tetapi RPH belum memenuhi syarat sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Harapan saya ada RPH yang memenuhi syarat sehingga permintaan dari Jakarta bisa terpenuhi", kata Wakil Mentan.

Hal serupa juga disampaikan Ketua Koperasi Wahyu Mitra Utama Tuban, Djoko Utomo, yang meminta Pemerintah untuk membantu merealisasikan pembangunan RPH bertaraf Internasional di Tuban untuk peternak sapi yang tergabung dalam Koperasi Wahyu Mitra Utama yang mengelola 2.017 ekor sapi dengan jumlah anggota 31 peternak. Tidak hanya itu di desa setempat diperlukan juga pasar hewan untuk pemasaran sapi. "Di Tuban sudah ada tempat pemotongan hewan, tetapi untuk menjaga kualitas produksi sapi peternak kami mengharapkan

Pemerintah membantu merealisasikan pembangunan RPH di Tuban," kata Ketua Koperasi Wahyu Utama.

Menanggapi permintaan rumah potong hewan (RPH) yang dekat dengan lingkungan peternak, maka Bupati Tuban Fathul Huda, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Jawa Timur telah menyediakan tanah seluas 1,5 hektare untuk membangun rumah pemotongan hewan (RPH) bertaraf internasional untuk menampung produksi sapi di daerah setempat. "Lokasi tanah untuk RPH sudah kami sediakan sejak tiga tahun lalu, bahkan sudah pernah dilakukan survei kelayakan," kata Bupati Tuban.

Mengenai kapan pembangunan RPH dapat direalisasikan, Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Husein mengaku belum dapat memastikannya, sebab pembangunan RPH tersebut masih dalam tahap diusulkan kepada Pemerintah Pusat. "Ya kalau harapan kita secepatnya pembangunan RPH direalisasikan, sebab akan bermanfaat untuk menampung produksi sapi Tuban," kata Wakil Bupati

Untuk Mendorong Percepatan Pembangunan Pertanian Diperlukan Perencanaan Yang Tepat & Strategis

"Untuk mendorong percepatan pembangunan pertanian ke depan, maka perencanaan yang tepat sangat penting dan strategis. Tahun 2015 merupakan tahun awal Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, maka struktur program dan kegiatan tahun 2015 merupakan keberlanjutan program sebelumnya"

Walaupun banyak keberhasilan yang telah dicapai dalam 5 tahun terakhir, namun Pemerintah menyadari masih ada sasaran yang belum tercapai, padahal pembangunan pertanian yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Pertanian 2010-2014 telah sampai di penghujung waktu. Untuk itu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004, setiap pemerintah daerah harus membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerahnya melalui suatu Musyawarah Perencanaan Pembangunan. "Untuk lebih mendorong percepatan pembangunan pertanian ke depan, maka perencanaan yang tepat sangat penting dan strategis. Kita perlu mencermati berbagai tantangan dalam membangun pertanian ke depan" kata Menteri Pertanian, Suswono saat memberikan sambutan di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Jawa Timur di Grand City Surabaya Jawa Timur (6/3).

Menurut Mentan ada beberapa tantangan yang harus dicermati antara lain adalah perubahan iklim, kondisi perekonomian global, gejolak harga pangan global, bencana alam, peningkatan jumlah penduduk, distribusi sumber daya yang belum optimal, dan laju urbanisasi yang tinggi. Kondisi iklim ekstrim basah (La-Nina) dan ekstrim kering (El-Nino) berdampak buruk pada produksi dan produktivitas pangan. "Meskipun



(Mentan Suswono saat berdialog dengan Gubernur Jatim, Soekarno dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Armida Salsiah. (Doc. Humas))

tidak selalu berdampak luas pada kegagalan panen, namun jika tidak diantisipasi dapat berakibat pada kekurangan pangan. Terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah, harga produk dan biaya produksi yang semakin tinggi serta krisis ekonomi dunia yang berdampak pada pelemahan ekspor juga merupakan tantangan yang harus kita hadapi dalam perekonomian nasional" ujar Mentan.

Mengenai fluktuasi harga pangan dunia yang tidak menentu, Mentan menjelaskan bahwa hal tersebut harus diantisipasi dengan pemenuhan kebutuhan dan

peningkatan produksi pangan nasional. Begitu pula terjadinya perubahan iklim meskipun sulit diprediksi, perlu diantisipasi melalui proses perencanaan yang lebih komprehensif dengan memperhitungkan resiko yang akan dihadapi. Sedangkan jumlah penduduk yang terus meningkat, dengan laju pertumbuhan 1,49 % per tahun diperlukan ketersediaan dan produksi pangan yang cukup. "Mengingat kondisi kita sebagai negara kepulauan, dan juga beragamnya potensi sentra-sentra penghasil pangan, maka aspek distribusi yang merata dan berkeadilan menjadi sangat penting. Di sisi lain masalah kelangkaan tenaga kerja di sektor pertanian adalah karena banyak tenaga pedesaan yang beralih profesi dan pindah ke kota. Untuk itu perlu dirancang program penumbuhan usaha-usaha baru di bidang pertanian di pedesaan" jelas Mentan.

Terkait dengan rencana program dan kegiatan tahun 2015, Mentan memaparkan bahwa tahun 2015 merupakan tahun awal Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, maka struktur program dan kegiatan tahun 2015 merupakan keberlanjutan program sebelumnya. Pada rancangan program dan kegiatan pada periode lima tahun ke depan, diperlukan beberapa kebijakan 5 tahun sebelumnya (2010-2014) yang masih harus ditingkatkan. "Untuk mendorong efektivitas upaya peningkatan produktivitas pertanian ke depan, maka fokus program diarahkan pada pembangunan kawasan sentra pertanian. Komoditas strategis dan unggulan yang kita programkan agar dikembangkan pada kawasan- kawasan andalan secara terpadu, sehingga menjadi satu kesatuan

dalam sistem pertanian bio-industri. Aktivitas usaha tani agar dikelola dengan prinsip pertanian lestari dengan memanfaatkan agro-input dan mengelola limbah dengan prinsip zero-waste melalui reduce, re-use dan re-cycle" papar Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan prinsip pertanian Bio-Industri adalah menekankan upaya meningkatkan kualitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian, mengintegrasikan usaha dan seluruh stakeholder dalam skala ekonomi pada kawasan pengembangan. Di samping dilakukan integrasi secara vertikal pada aspek hulu sampai dengan hilir, juga dilakukan integrasi horisontal dengan mengintegrasikan berbagai komoditas dan jenis usaha yang sesuai. "Guna mendukung pengembangan kawasan andalan tersebut, maka peran Pemerintah akan fokus untuk memperkuat infrastruktur dan kelembagaan pertanian, memberdayakan petani, mempercepat peningkatan produksi guna memenuhi target swasembada dan swasembada berkelanjutan" jelas Mentan

Mentan juga menegaskan disamping membangun kawasan andalan pertanian, pemerintah tidak akan melupakan daerah-daerah lain yang tidak menjadi wilayah potensial produksi pangan. Pelayanan dasar bidang pertanian agar tetap diprogramkan untuk melayani di semua wilayah pertanian, yang mencakup aspek perbenihan, penyuluhan, pengembangan teknologi, pengendalian OPT, infrastruktur dasar dan lainnya.

Sebagai Lumbung Pangan Indonesia, Jawa Timur Perlu Melakukan Perubahan Kualitas Program Pembangunan Pertanian

"Kinerja Provinsi Jawa Timur sebagai lumbung pangan Indonesia harus dipertahankan di masa mendatang melalui berbagai upaya peningkatan produksi dan produktivitas. Jajaran Pemerintah Daerah Jawa Timur, khususnya yang berada di lingkup pertanian, agar mulai tahun 2014 dilakukan berbagai perubahan mendasar guna meningkatkan kualitas kinerja program dan anggaran pembangunan pertanian"

Hingga saat sekarang, Jawa Timur masih menjadi salah satu lumbung pangan terbesar di Indonesia. Kontribusi produksi padi tahun 2013 sebesar 12,05 juta ton atau 17,7 % dari produksi nasional, menjadikan Jawa Timur sebagai produsen padi terbesar nomor dua setelah Jawa Barat. Oleh karena itu Kementerian Pertanian memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. "Pada kesempatan yang baik ini, Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh petani Jawa Timur atas kontribusinya dalam meningkatkan produksi pangan nasional" kata Menteri Pertanian di sela sela acara Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Timur di Grand City Surabaya Jawa Timur (6/3).

Menurut Mentan, kontribusi provinsi Jawa Timur ternyata tidak hanya pada produksi padi saja, produksi

jagung Jawa Timur pada tahun 2013 sebesar 5,75 juta ton atau 31,2 % dan produksi nasional, sehingga menjadi produsen jagung terbesar di Indonesia. Prestasi yang sama untuk kedelai Jawa Timur sebagai produsen terbesar di Indonesia, dimana produksi kedelai tahun 2013 sebesar 329,5 ribu ton atau 42,4% dan produksi nasional. "Kinerja Provinsi Jawa Timur sebagai lumbung pangan Indonesia ini tentunya harus dipertahankan di masa mendatang melalui berbagai upaya peningkatan produksi dan produktivitas. Hal ini sangat penting mengingat terdapat kecenderungan penurunan produktivitas dan produksi tanaman pangan Jawa Timur terhadap produksi Nasional" pinta Mentan.

Lebih lanjut Mentan memaparkan bahwa berdasarkan evaluasi kinerja produksi pada beberapa tahun terakhir, dijumpai beberapa kinerja produksi yang perlu ditingkatkan, yaitu pada beberapa daerah masih terjadi keterlambatan tanam, terjadi kelambatan dalam



(Mentan Suswono saat menyampaikan arahnya di depan para peserta Musrenbang RPJMD Prop. Jatim. (Doc. Humas))

antisipasi serangan organisme pengganggu tanaman, masih kurangnya respon cepat upaya penanganan bencana alam yang berdampak pada sektor pertanian, pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran belum mencapai target serta realisasi keuangan yang menumpuk pada akhir tahun, sehingga kegiatan yang dilaksanakan belum berdampak pada kinerja tahun berjalan.

“Belajar dan pengalaman tersebut, Saya meminta jajaran Pemerintah Daerah Jawa Timur, khususnya yang berada di lingkup pertanian, agar mulai tahun 2014 ini dilakukan berbagai perubahan mendasar guna meningkatkan kualitas kinerja program dan anggaran pembangunan pertanian” kata Mentan.

Mentan menjelaskan ada beberapa upaya khusus yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah antara lain: melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi di wilayah yang masih potensial, antara lain memanfaatkan lahan potensial di Perum Perhutani, meningkatkan kinerja operasional agar pelaksanaan kegiatan senantiasa mempertimbangkan musim tanam dan kesiapan petani, terus mengupayakan percepatan realisasi fisik di lapangan, mengintensifkan pengendalian dan pemantauan di lapangan agar

dipastikan setiap kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Mentan juga mengingatkan munculnya serangan OPT khususnya Wereng Batang Coklat (WBC) meningkat, yang apabila tidak segera dilakukan pengendalian dikhawatirkan akan mengancam produksi 2014. Pada MH 2013-2014 di Provinsi Jawa Timur yang terkena serangan WBC seluas 2.192 ha dan 44 ha diantaranya terjadi puso. “Intensitas dan sebaran serangan OPT dikhawatirkan semakin tinggi, mengingat populasi WBC masih tinggi, ditemukan di lapangan kondisi pertanian yang kerdil rumput dan kerdil hampa sebagai gejala penyakit virus dari WBC, pertanian padi sebagian besar pada tahap persemaian dan tanaman muda, menjadi stadia yang paling disukai WBC, serangan OPT seperti tikus, WBO, keong mas, blast dan kresek, akan semakin meningkat pada wilayah pasca terjadinya banjir” jelas Mentan.

Berkaitan dengan serangan OPT tersebut, Mentan meminta jajaran Pemerintah Daerah Jawa Timur untuk meningkatkan upayanya dalam pengendalian OPT, antara lain dengan meningkatkan kewaspadaan dan penanganan khusus terhadap pertanian pasca banjir dan deteksi dini serangan WBC, pada tingkat kecamatan, dilakukan pengamatan mingguan terhadap perkembangan populasi/ serangan OPT dan pengamatan faktor iklim, pada tingkat wilayah karesidenan, dilakukan surveillance untuk memantau perkembangan dan check and recheck populasi / serangan OPT.

Pemda juga harus menyusun rencana gerakan pengendalian OPT dalam areal yang lebih luas, menggunakan agens hayati dan insektisida yang efektif dan menempatkan BPP / Kecamatan sebagai Posko Pengendalian WBC, serta bila diperlukan dapat memanfaatkan pestisida yang saat sekarang persediaannya di Brigade Proteksi Tanaman Provinsi masih cukup tersedia.

Kementan Siapkan Dana 103 M. Untuk Atasi Bencana Letusan Gunung Kelud

“Kementan menyiapkan dana Rp 103 miliar yang disalurkan secara bertahap pada korban bencana. Untuk peternak yang mengalami kesulitan pakan, telah dikirimkan lebih 500 ton pakan ternak untuk sapi. Lahan jagung, kedelai yang puso akibat terkena banjir, disiapkan benih jagung sebanyak 14.340 kg dan kedelai sebanyak 17.400 kg”

Komoditas pertanian yang paling banyak terkena dampak erupsi adalah padi dan jagung, sayuran seperti cabai, tomat, dan kacang panjang karena lahan yang terselimuti material erupsi. Komoditas lainnya adalah kopi, kakao dan tebu, serta tanaman buah-buahan yakni jeruk, apel, durian, dan mangga dengan taraf kerusakan ringan hingga berat. Kementerian Pertanian memperkirakan kerugian pada lahan pertanian akibat dampak erupsi Gunung Kelud, Jawa Timur, mencapai Rp. 377,54 miliar.

“Untuk mengatasi kerugian tersebut, Kementerian Pertanian telah menyiapkan dana Rp 103 miliar untuk korban bencana letusan Gunung Kelud. Dana yang diambil dari dana kontingensi APBN 2014 dan dana lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu akan digunakan untuk membantu menyediakan bibit tanaman pangan, sayur, dan buah, serta membantu menyediakan rumput pakan ternak dan konsentrat. Dana itu nantinya akan disalurkan secara bertahap pada korban bencana, bisa saja dana



(Kerugian pertanian akibat bencana erupsi gunung (Doc.Humas))

tersebut nantinya bertambah,” kata Menteri Pertanian, Suswono saat konferensi pers di kanpus Kementan, Jakarta, (4/3).

Menurut Mentan, untuk lahan pertanian yang tertutup material abu kurang dari 20 sentimeter pihak Kementerian Pertanian akan merehabilitasinya dengan mengolah lahan pertanian, dicampur dengan tanah asli dan ditambah dosis bahan organik sebesar lima ton per hektar. Sedangkan lahan kering untuk sayuran, akan diolah dengan tanah asli yang ditambah bahan organik dosis lima ton per hektar. “Tanaman kebun kaya kopi dan coklat yang masih hidup harus segera dipelihara, yang mati akan dilakukan penyulaman dengan lubang berkedalaman 60 sentimeter. tanah dicampur dengan organik digunakan untuk menimbun lubang,” ujar Mentan.

Terkait dengan sapi perah, Mentan mengatakan bahwa berdasarkan pendataan Kementan, sebagian besar peternak sapi perah di Kabupaten Malang, Kediri, dan sekitarnya mengalami kesulitan pakan. dan sebagian sudah banyak yang menjual sapinya. Oleh karena itu Kementerian Pertanian telah mengirimkan lebih 500 ton pakan ternak untuk sapi. “Karena kesulitan mendapatkan pakan ternak menyebabkan sebagian peternak terpaksa menjual sapi mereka. Penyebab kesulitan pakan karena banyak lahan pakan ternak yang rusak dan tertutup material erupsi. Ada dua pola bantuan yang diberikan yaitu pemberian pakan atau di pindahkan ke daerah yang lebih aman. Bagi peternak sapi perah yang kesulitan mendapatkan pakan ternak, kami sudah kirimkan bantuan pakan ternak jumlahnya lebih dari 500 ton.” ujar Mentan.

Sedangkan mengenai masalah banjir yang terjadi di beberapa wilayah yang ada di Indonesia beberapa waktu lalu, Mentan mengatakan luas tanaman pangan yang terkena banjir relatif kecil. sehingga tidak akan membuat pasokan pangan terganggu. “Sejauh ini dampak dari banjir tanaman pangan pokok khususnya padi belum mengkhawatirkan karena luas tanamnya yang terkena banjir tergolong kecil,” kata Mentan.

Mentan menjelaskan pihak Kementerian Pertanian telah menghitung luas lahan tanam tanaman pangan terkena banjir dan terkena puso atau gagal panen. Dari perhitungan tersebut, Kementan memperkirakan kebutuhan benih padi untuk penanaman ulang sekitar

3.168 ton. “Data Kementerian Pertanian menunjukkan hingga 20 Februari 2014 luas tanaman padi yang terkena banjir mencapai 302.170 ribu hektar atau 4,3% total luas tanam. Sedangkan puso (gagal panen) 137 hektar atau 1,99% total luas tanam. Tanaman puso akibat banjir terjadi di Jabar, Jateng, Aceh, Jatim, Lampung, Sulsel, Sumut dan NTB” jelas Mentan.

Selain padi, Mentan menuturkan bahwa lahan tanaman pangan seperti jagung dan kedelai juga terkena banjir. Jagung misalnya, dari luas tanam sebesar 3.291 ha, yang terkena puso sekitar 956 ha atau 0,05% dari luas tanam sebesar 1,91 juta ha. Sementara lahan kedelai terkena banjir seluas 1.510 ha, yang mengalami puso 425 ha atau 0,22% luas tanam. Puso terbesar kedelai akibat banjir terjadi di Riau, Jawa Tengah, Jambi dan Sumatera Utara. “Untuk mengatasi hal itu pihak Kementan menyiapkan benih jagung sebanyak 14.340 kg dan kedelai sebanyak 17.400 kg. Mekanisme penggantian benih ini memerlukan verifikasi dinas pertanian Kota/ Kabupaten dan Propinsi. Namun, pemerintah pusat juga telah menyiapkan benih dan siap menyalurkan secepatnya.

Berkurangnya produksi akan dapat dikejar dari masa tanam kedua nanti. Sementara yang menjadi kekhawatiran justru dari adanya serangan hama. Pada musim kemarau tahun 2014, diperkirakan muncul bencana bagi petani. Untuk itu Mentan meminta petani mewaspadaai serangan berbagai jenis hama pada April-Mei 2014, yang merupakan awal musim kemarau. “Persoalan yang terjadi ada dari sepanjang masa tanam kedua, jika sepanjang masa tanam kedua nanti optimal, target merealisasikan rencana Bukit Tinggi akan terkejar. Yang dikhawatirkan justru hama, karena di beberapa daerah ada hama tikus, wereng dan blast itu di beberapa tempat juga ada. Relatif yang sekarang ini belum mengkhawatirkan namun akan ada kemungkinan eksplosif,” jelas Mentan.

Mentan memperkirakan pada April-Mei 2014 akan terjadi ledakan hama wereng, belalang, dan jamur. Hama-hama tersebut biasanya berkembang biak dan menyerang berbagai jenis tanaman pada musim kering. Pemerintah akan memutuskan langkah antisipasi dalam rapat koordinasi pada bulan Maret 2014. Penanganan hama akan difokuskan pada daerah sentra pertanian, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. “Kementerian Pertanian menargetkan produksi beras nasional mencapai 76 juta ton untuk tahun 2014. Jika terjadi serangan hama maka target produksi belum diketahui. Untuk itu kami akan mengantisipasi kekurangan produksi pangan akibat serangan hama dan dalam menanggulangi serangan hama, Kementan akan meminta bantuan pihak terkait. Salah satunya: adalah TNI. Ternyata serangan hama tidak hanya terjadi pada musim kering. Pada musim hujan, petani juga harus mewaspadaai serangan hama wereng batang coklat, tungro, dan jamur” kata Mentan.

Mengenai program asuransi pertanian, Mentan menerangkan bahwa program tersebut diperuntukan bagi seluruh petani di Indonesia dan baru akan efektif dilaksanakan pada tahun 2015. Namun nantinya tidak semua komoditas akan dicakup oleh asuransi pertanian. "Jadi nanti hanya tanaman pangan dulu,

terutama beras, akan diutamakan. Hal ini karena beras merupakan komoditas primer dan bahan makanan pokok masyarakat Indonesia, Sedangkan bagi petani yang kemungkinan mengalami gagal panen, pemerintah telah menyediakan anggaran Rp 200 miliar untuk dana bantuan" terang Mentan.

Masalah Iklim dan Lahan Pertanian Masih Jadi Tantangan

"Untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia, Pemerintah mengalami banyak tantangan. Sektor pertanian menghadapi berbagai tantangan, di antaranya lahan pertanian yang semakin sempit dan perubahan iklim yang akan mempengaruhi produksi beras. Sementara untuk mencetak sawah-sawah baru, lahan yang siap masih terbatas"

Negara yang mempunyai ketahanan pangan baik, akan menjadi negara yang kuat. Jika ketahanan pangan suatu negara itu baik maka akan bisa surplus pangan. Dengan begitu negara tersebut akan menjadi negara kuat dan tidak bisa didikte oleh negara lain, Untuk itu Pemerintah Indonesia bertekad akan terus mewujudkan ketahanan pangan dengan cara meningkatkan pembangunan di sektor pertanian. "Saat ini dalam sektor pertanian khususnya dalam produksi padi, Indonesia sendiri sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional dan bisa surplus sebanyak 3.000.000 ton. Dengan begitu produksi padi nasional cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat," kata Menteri Pertanian, Suswono saat menjadi narasumber dialog interaktif bertema penguatan kebijakan pertanian menuju kedaulatan pangan yang berkelanjutan di kampus Universitas Pekalongan, Jawa Tengah (1/3).

Namun menurut Mentan, produksi padi nasional ternyata masih belum optimal karena target pemerintah dalam sektor pertanian khususnya produksi padi adalah mampu untuk surplus sebanyak 10.000.000 ton. Sedangkan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia, Pemerintah mengalami banyak tantangan. Sektor pertanian menghadapi berbagai tantangan, di antaranya lahan pertanian yang semakin sempit dan perubahan iklim yang akan mempengaruhi produksi beras. Sementara untuk mencetak sawah-sawah baru, lahan yang siap masih terbatas. "Pemerintah masih harus bisa mengoptimalkan lagi untuk sektor padi, karena targetnya kita mampu surplus sebanyak 10.000.000 ton, walaupun hal tersebut tidak mudah karena akan menghadapi banyak tantangan, diantaranya adalah iklim pada saat sekarang sulit diprediksi. Selain iklim, hal yang masih menjadi tantangan adalah lahan yang semakin menyempit karena dampak pertumbuhan penduduk yang pesat, sehingga membuat konversi lahan pertanian menjadi tempat tinggal penduduk" ujar Mentan.

Kendati mengalami banyak tantangan, Mentan menegaskan tantangan tersebut harus tetap dihadapi oleh Pemerintah dalam memajukan sektor pertanian, Seperti iklim yang susah diprediksi, pihak

Kementerian Pertanian sedang mencari solusi untuk hal tersebut dengan cara mengembangkan teknologi dibidang pertanian. Selain itu juga telah disiapkan program berbasis kemandirian untuk menghadapi tantangan—tantangan tersebut yaitu tercapainya swasembada, diversifikasi pangan, meningkatkan nilai ekspor, dan kesejahteraan petani. "Untuk meningkatkan produktivitas padi bisa dilakukan dengan metode *system of rice intensification* (SRI), pola tanam padi jajar legawa dan pola pemupukan berimbang. Sementara itu, untuk mengatasi semakin sempitnya lahan pertanian, masyarakat harus didorong menerapkan konsep rumah pangan lestari" tegas Mentan.

Mengingat dalam mengembangkan sektor pertanian diperlukan sinergi dan kerjasama serta koordinasi yang kuat, konsisten dan berkesinambungan antara pemerintah, pengusaha dan para aktifis bidang pertanian, maka Mentan berharap Pekalongan dapat menjadi kota percontohan bagi kota-kota lain dalam hal peningkatan sektor pertanian, karena Kota Pekalongan masih memiliki lahan yang luas yang bisa di gunakan. Selain itu, Universitas Pekalongan menjadi pendukung terciptanya kemandirian pangan di Kota Pekalongan.

Lebih lanjut Mentan menerangkan bahwa untuk ke depan harga pangan kian menarik. Faktor jumlah penduduk menjadi pendorongnya. Kebutuhan pangan



(Lahan Pertanian yang semakin sempit oleh dasarnya alih fungsi lahan.(Doc.Humas))

akan meningkat terus karena pangan komoditas yang selalu dibutuhkan. "Seiring pertumbuhan penduduk terutama wilayah Indonesia, maka kebutuhan panganpun akan ikut melonjak. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta saja sudah menjadi ladang bisnis pangan" terang Mentan.

Mentan mengatakan dengan adanya mahasiswa pertanian yang lulusannya menjadi sarjana pertanian maka dapat berperan aktif menyukseskan bisnis pangan. Diharapkan dengan bisnis pangan yang semakin prospektif kiranya mereka dapat memanfaatkan lahan yang ada. Walaupun, lahan pertanian kian tergerus akibat perubahan lahan menjadi tempat selain lahan pangan.

"Oleh karena itu, kita harus menciptakan pangan lokal yang memiliki daya saing dengan pangan asal impor, tentunya perlu efisien dalam mengolah pangan

domestik. Kita jangan kalah bersaing dengan negara maju, sisi efisien peran perguruan tinggi menghasilkan efisien pangan kita. Para mahasiswa harus tetap semangat," kata Mentan.

Selain kepada Mahasiswa Universitas Pekalongan, Mentan juga meminta masyarakat dapat mengonsumsi bahan pangan non beras untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras guna mewujudkan kedaulatan pangan. Masyarakat diharapkan beralih ke komoditas pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat. "Makanan lokal harus dihidupkan lagi, karena ketergantungan masyarakat terhadap beras sangat tinggi. Bagi masyarakat, merasa belum makan jika belum makan nasi. Padahal, masih banyak sumber karbohidrat yang bisa dikonsumsi untuk menggantikan beras. Di antaranya jagung, umbi-umbian, sagu dan pisang" harap Mentan.

Atasi Serangan OPT Di Ja-Teng, Kementan Memaparkan Langkah Teknis

"Terjadi penurunan produksi padi di Jawa Tengah akibat penurunan produktivitas padi yang disebabkan oleh meningkatnya luas serangan OPT pada tanaman padi. Untuk mengantisipasi serangan OPT yang lebih parah, maka Kementan memaparkan langkah-langkah secara teknis yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah"

Dari laporan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diketahui terjadi penurunan produksi padi di Jawa Tengah akibat penurunan produktivitas padi yang disebabkan oleh meningkatnya luas serangan OPT terhadap tanaman padi pada tahun 2013 dan dikhawatirkan meningkat pula pada tahun 2014. Oleh karena itu Kementerian Pertanian melakukan Rapat Koordinasi untuk mengantisipasi terjadinya serangan OPT yang lebih parah.

"Jawa Tengah sebagai sentra produksi utama padi setelah Jawa Timur dan Jawa Barat, sangat diharapkan produksi terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan kondisi penurunan produksi padi di Jawa Tengah, maka Wantimpres menyampaikan kekhawatirannya, mengingat pentingnya pangan/beras sebagai pangan pokok dan pengaruhnya terhadap aspek lain, utamanya seperti inflasi dan stabilitas nasional" kata Menteri Pertanian, Suswono saat Rapat Koordinasi dengan Bupati/Walikota se Provinsi Jawa Tengah di Semarang (10/3).

Mentan memaparkan untuk mengantisipasi serangan OPT yang lebih parah, maka secara teknis harus dilakukan hal-hal seperti peningkatan pengamatan di lapangan terhadap perkembangan serangan, sehingga dapat segera dilakukan pengendalian di persemaian dan tanam muda, melakukan pengendalian dengan melakukan eradikasi sumber serangan (semprot dan bakar), meningkatkan koordinasi pengendalian OPT dengan mengaktifkan posko-posko pengendalian tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, melakukan

gerakan massal pengendalian OPT. Pelaksanaan gerakan pengendalian dapat melibatkan TNI dan pemberian bantuan pestisida/agens hayati.

"Kekhawatiran terhadap serangan OPT ini sejalan dengan pengalaman tahun 2010 dimana terjadi musim kemarau yang basah, yang memicu petani mengganti pola tanam dan padi-padi-palawija di lahan sawah menjadi padi-padi-padi. Dengan perubahan pola tanam tersebut, pada tahun 2011 produksi padi Jawa Tengah turun sekitar 718 ribu ton GKG (-7.11%) dari pencapaian produksi tahun 2010 sebagai akibat serangan OPT" papar Mentan.

Dalam rapat koordinasi tersebut Mentan mengharapkan sinergi dari semua tingkatan dan jajaran, dalam mengamankan produksi pangan nasional yang dimulai dari kabupaten dan provinsi. Mengingat keterbatasan APBN, maka Mentan juga sangat berharap APBD provinsi dan kabupaten mendukung upaya pengamanan produksi padi tahun 2014. "Dapat kami contohkan pada Provinsi Jawa Barat dengan dukungan APBD pada tahun 2013, antara lain dengan penambahan THL PPL 100 orang dan Pengamat OPT 396 orang, menggerakkan TNI dan masyarakat dalam percepatan olah tanah, tanam, panen dan pengendalian OPT maka pada tahun 2013 Jawa Barat mampu meningkatkan produksi padi sebesar 811 ribu ton dari produksi padi tahun 2012" ungkap Mentan.

Terkait produksi padi di Jawa Tengah, Mentan

menjelaskan berdasarkan Angka Sementara (ASEM) 2013 Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi tahun 2013 secara nasional mencapai 71,291 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat 2,23 juta ton atau 3,24 % dan pencapaian produksi tahun 2012 sebesar 69,056 juta ton GKG."Produksi padi di Provinsi Jawa Tengah mencapai 10,344 juta ton GKG, meningkat sejumlah 111,9 ribu ton atau 1,09 % dari pencapaian produksi tahun 2012 sejumlah 10,233 juta ton GKG" jelas Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan untuk produksi padi tahun 2014, berdasarkan prognosa BPS sebelum tahun 2012 disebut sebagai Angka Ramalan/ARAM I secara nasional mencapai 71,29 juta ton GKG, atau turun 70 ribu ton (-0,10%) dari ASEM 2013. Sedangkan jika dibandingkan dengan target 2014 sebesar 76,57 juta ton GKG, maka capaian prognosa tersebut masih terdapat selisih 5,28 juta ton GKG (-7,42%). "Produksi padi Jawa Tengah berdasarkan prognosa 2014 mencapai 10,316 juta ton, turun 28,5 ribu ton (-0,28%) terhadap ASEM tahun 2013 dan bila dibandingkan dengan target produksi padi Jawa Tengah tahun 2014 sebesar 10,27 juta ton GKG maka prognosa 2014 ini masih selisih sebesar 40 ribu ton GKG (-5,95%)" jelas Mentan.

Mentan juga mengingatkan bahwa dalam rangka



(Mentan Suswono didampingi Wamentan Rusman Heriawan melakukan Rapat koordinasi antisipasi serangan OPT.(Doc.Humas))

memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras untuk mewujudkan swasembada beras berkelanjutan serta surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014, maka sasaran produksi padi tahun 2014 ditetapkan 76,6 juta ton GKG. Untuk mencapai sasaran produksi tersebut dilakukan melalui 4 strategi pokok yaitu peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, pengamanan produksi melalui pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), mitigasi dampak perubahan iklim (DPI) berupa banjir dan kekeringan serta pengurangan susut hasil (losses); serta penguatan SDM, Permodalan dan Kelembagaan tani.

Perkuat Industri Pengolahan Hasil Pertanian Lewat Penerapan Teknologi

"Dengan semakin berkembangnya industri bernilai tambah, bakal menggenjot pendapatan petani. Penguatan industri bernilai tambah dari sektor pangan sangat diperlukan Untuk itu inovasi dan teknologi pengolahan hasil pertanian harus terus dihasilkan supaya petani sejahtera. Kementan sebagai pemegang otoritas pertanian akan meningkatkan produksi alat pengolah pertanian di masa mendatang"

Pemerintah Indonesia memperkirakan produk-produk impor kawasan negara lain bakal membanjiri pasar dalam negeri apabila dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 tidak dihadapi dengan penguatan industri bernilai tambah dari sektor pangan. Untuk itulah, pihak Kementerian Pertanian merasa perlu menggelar pameran penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian.

"Kementan sebagai pemegang otoritas pertanian berjanji meningkatkan produksi alat pengolah pertanian di masa mendatang. Saya yakin, dengan semakin berkembangnya industri bernilai tambah, bakal menggenjot pendapatan petani. Artinya inovasi dan teknologi ini harus terus dihasilkan supaya petani sejahtera" kata Menteri Pertanian Suswono di sela acara pameran penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian di Auditorium Gedung F kampus Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta (19/3).

Menurut Mentan, hingga tahun 2013, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian telah memfasilitasi

pengembangan 2.715 unit alat pengolah produk pertanian dengan menggandeng kelompok tani. Khusus tahun 2014, akan difasilitasi pengembangan 889 unit pengolahan pertanian di seluruh provinsi.

Dalam pameran yang diikuti 600 peserta, yang terdiri dari perusahaan, SMK, perguruan tinggi, hingga paguyuban petani se-Indonesia, Mentan menyatakan pihaknya menggelar Pameran Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian 2014 pada 19-21 Maret 2014, menjadi suatu gelaran penerapan produk olahan pertanian dengan konsep zero waste atau tanpa limbah guna peningkatan daya saing pelaku usaha agribisnis lokal. "Pengembangan agribisnis yang didukung agroindustri pedesaan berbasis sumber daya lokal, dengan konsep tanpa limbah (zero waste), merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan konsep zero waste ini, maka seluruh komponen dari komoditi harus menjadi produk yang mempunyai nilai jual, sehingga penggunaan sumber daya menjadi efisien dan dapat menekan biaya produksi" kata Mentan.

Mentan menjelaskan bahwa konsep zero waste yang sering juga disebut bio industri, menuntut terlaksananya pembangunan pertanian yang terpadu, karena limbah dan budidaya tanaman akan menjadi pakan ternak, bio gas dan produk turunan airnya, dan sebaliknya limbah peternakan dapat digunakan sebagai pupuk, bio gas, bio urine dan juga kompos, yang memungkinkan terwujudnya nilai tambah disetiap rantai produksi. "Dengan konsep zero waste ini, maka seluruh komponen dari komoditi memiliki nilai jual, sehingga penggunaan sumber daya menjadi efisien dan dapat menekan biaya produksi, Konsep ini, menuntut terlaksananya pembangunan pertanian yang terpadu, karena limbah dari budi daya tanaman bisa dimanfaatkan menjadi pakan ternak, biogas dan produk turunan lainnya, serta sebaliknya, yaitu limbah peternakan bisa dipakai untuk pupuk dan kompos" kata Mentan.

Selain untuk memperkenalkan konsep zero waste, Mentan memaparkan perlunya dikembangkan hilirisasinya dari masing-masing produk olahan yang dihasilkan agar nilai tambah yang dihasilkan semakin meningkat. Dengan konsep tersebut, suatu usaha yang dinilai tidak layak, dapat menjadi layak dan bahkan dapat menghasilkan produk yang berdaya saing, ramah lingkungan dan berkelanjutan. "Pemanfaatan limbah dari penggilingan padi dan ternak dapat menghasilkan produk yang mempunyai nilai jual seperti biogas, bio urine, kompos dan sebagainya, yang sudah tentu dapat meningkatkan pendapatan petani. Model lain yang sudah melalui uji coba dan dapat di kembangkan adalah sapi dengan sawit serta sapi dengan tebu" papar Mentan.

Sedangkan untuk mendukung implementasi pengembangan agribisnis yang di dukung agroindustri di pedesaan dengan konsep bio industri, Mentan juga menjelaskan telah tersedianya berbagai sarana teknologi pengolahan hasil tepat guna yang diproduksi



(Salah satu bentuk teknologi pengolahan hasil pertanian yang dihasilkan Kementan. (Doc.Humas))

oleh anak bangsa, yang tentunya terus dituntut pengembangannya secara berkelanjutan, mengingat teknologi itu bersifat dinamis. "Bio industri merupakan pilihan cerdas untuk meningkatkan nilai tambah yang langsung berkontribusi terhadap kesejahteraan petani, disamping menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing di pasar global" jelas Mentan.

Mentan berharap pameran penerapan teknologi dapat dijadikan sebagai ajang para pengusaha lokal untuk mempromosikan produk hilir yang memiliki nilai tambah tinggi. Gelaran pameran teknologi juga untuk memamerkan diversifikasi produk olahan dari empat sektor agribisnis dan agroindustri, yaitu peternakan, perkebunan, pangan dan hortikultura. "Pameran ini akan mensosialisasikan atau menginformasikan ketersediaan teknologi pengolahan hasil pertanian. Sehingga baik petani maupun pengusaha lokal mengetahui teknologi apa saja yang bisa digunakan untuk menginovasi produk yang dijualnya, Kita harus meningkatkan kualitas produk dalam negeri, terutama produk hortikultura, jika tidak, 2015 nanti kita masuk dalam pasar global, jika tidak siap maka kita hanya akan jadi pasar negara-negara lain" harap Mentan.

Program Integrasi Sawit Berpotensi Capai Swasembada Daging Sapi

"Program integrasi sapi sawit yang merupakan salah satu program andalan Kementerian Pertanian. program peternakan sapi di lahan sawit dapat berpotensi mambantu target swasembada daging sapi di dalam negeri. Program integrasi sawit-sapi merupakan program yang sangat efektif yang dapat mengintegrasikan usaha perkebunan sawit dan usaha peternakan sapi dalam satu lokasi lahan"

Karena keberhasilannya dalam pengembangan program integrasi sawit dan sapi, membuat Kabupaten Kotawaringin Barat di provinsi Kalimantan Tengah layak menjadi salah satu kabupaten percontohan bagi daerah-daerah lain di Indonesia, hal tersebut yang dikatakan Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan saat melakukan kunjungan kerja ke perusahaan sawit di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, (14/3).

Wakil Mentan mengaku kunjungannya ke beberapa perusahaan kelapa sawit di Kalimantan Tengah.

adalah dalam rangka mencari model integrasi sapi sawit terbaik yang bisa diterapkan dalam program integrasi sapi sawit yang merupakan salah satu program andalan Kementerian Pertanian.

"Walaupun terus mensosialisasikan program sapi sawit namun pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian hanya menyampaikan imbauan dan bukan perintah. Kita harapkan dengan memberi contoh-contoh yang baik mudah-mudahan perusahaan lain tertarik," ujar Wakil Mentan.



(Bentuk integrasi antara perkebunan kelapa sawit dengan peternakan sapi menjadi program andalan Kementan.(Doc.Humas))

Wakil Mentan menerangkan program integrasi sawit-sapi merupakan program yang sangat efektif yang dapat mengintegrasikan usaha perkebunan sawit dan usaha peternakan sapi dalam satu lokasi lahan dan secara efisien mampu menerapkan pola dalam pengelolaan limbah, baik limbah perkebunan atau limbah peternakan. Program Integrasi Sawit dan Sapi ini juga dinilai sebagai wujud penerapan kebijakan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

"Limbah sawit yang dihasilkan perkebunan, bisa menjadi pakan ternak. Begitu juga limbah peternakan sapi. Sapi menghasilkan kotoran organik yang bisa menjadi pupuk untuk perkebunan sawit. Jadi, tidak selamanya perkebunan sawit itu membawa dampak buruk. Integrasi sawit-sapi ini contoh pengelolaan perkebunan dan peternakan yang baik. Oleh karena itu kita juga mengeluarkan kebijakan ISPO," terang Wakil Mentan.

Lebih lanjut Wakil Mentan menjelaskan bahwa hingga akhir tahun 2014, seluruh perkebunan di Indonesia harus sudah mengaplikasikan sistem ISPO. Salah satu poin pentingnya, ISPO mendorong agar para pengusaha perkebunan sawit menggunakan pupuk organik. Penerapan program integrasi sawit-sapi di Kotawaringin Barat merupakan contoh riil dari aplikasi ISPO melalui penggunaan pupuk organik yang dihasilkan oleh ternak sapi.

"Meski belum bisa mendapat sertifikat ISPO. Tapi paling tidak, para pengusaha perkebunan sudah mengaplikasikan ISPO mulai akhir 2014 mendatang. Kita tidak bicara tentang bagi perkebunan yang belum mengaplikasikan ISPO, kalau ada yang bisa kita terima dari mereka," jelas Wakil Mentan.

Terkait dengan target Swasembada Daging, Wakil Mentan memaparkan bahwa program peternakan sapi di lahan sawit dapat berpotensi mambantu target swasembada daging sapi di dalam negeri. Jika program tersebut dipatuhi oleh seluruh pemilik lahan sawit, maka ada potensi tambahan 9 juta populasi sapi. Saat sekarang populasi sapi di Indonesia sekitar

14 juta dengan produksi sapi baru per tahun 2,5 juta ekor sedangkan yang harus dipotong sekitar 3 juta ekor. Artinya ada kekurangan sekitar 500 ekor, kekurangan inilah yang masih dipenuhi melalui impor dari Australia.

"Kalau masalah swasembada secara hitung-hitungannya mudah, apabila semua perusahaan kelapa sawit jumlah lahannya 9 juta hektar, dengan kapasitas pengembalaan untuk sapi 1 ekor/hektar dan semua perusahaan tersebut mau menjalankan program integrasi sapi sawit maka otomatis, Indonesia punya 9 juta ekor ditambah 14 juta populasi yang sudah ada. Hal ini sudah lebih dari cukup itu," papar Wakil Mentan.

Wakil Mentan menyatakan Kementerian Pertanian siap mendukung penuh program integrasi peternakan sapi dengan lahan sawit. Dukungan yang diberikan berupa kemudahan impor sapi dan bantuan teknis. Beberapa kemudahan termasuk kemudahan izin dan impor.

"Kalau dulu beberapa perusahaan kelapa sawit yang masih mengalami kesulitan mengimpor sapi dari Australia karena tidak adanya payung hukum yang mengatur perusahaan kelapa sawit untuk mengimpor sapi. Namun kini, hal itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.98 tahun 2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan. Pemerintah juga sudah menyelesaikan draft petunjuk teknis integrasi sapi sawit, saat ini sudah masuk ke Biro Hukum dan diperkirakan akan selesai pada Agustus tahun 2014" kata Wakil Mentan.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Syukur Iwantoro juga menyatakan dukungannya dengan mengirimkan ahli-ahli teknisnya dengan cuma-cuma ke perusahaan yang berniat mengintegrasikan peternakan sapi dengan lahan sawit.

"Perusahaan yang semangat betul menjalankan sapi sawit akan kita dukung dan kita jadikan percontohan," kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar mengatakan, besarnya dukungan dari Kementan terhadap Program Integrasi Sawit-Sapi yang dikembangkan di Kotawaringin Barat perlu direspon dengan baik. Ke depan perlu sebuah payung hukum yang mengharuskan setiap pengusaha perkebunan sawit menerapkan program tersebut.

"Jadi bagi peternak sapi dan pengusaha perkebunan harus bersinergi menerapkan program integrasi sawit-sapi. Kita juga sudah bekerja sama dengan Universitas Antakusuma dalam riset program ini," kata Bupati Kota Waringin Barat



BIRO UMUM DAN HUMAS
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
Jl. Harsono RM, No. 3 Jakarta Selatan
Telp./Fax (021) 780 4457 (ext.2316)